

Optimalisasi Manajemen dalam Penerapan Inklusi Pendidikan di Sekolah Dasar

Asyfa Nurul Rahma

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Singaperbangsa Karawang

e-mail: asyfanurulrahma070103@gmail.com

Article Info

Article history:

Received 02-06-2023

Revised 17-06-2023

Accepted 21-06-2023

Published 26-06-2023

Keyword:

Manajemen Sekolah,
Pendidikan Inklusi, Sekolah
Dasar

School Management, Inclusive
Education, Elementary School

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan bagaimana inklusi pendidikan diimplementasikan di sekolah dasar melalui manajemen sekolah. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dalam bentuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kepala sekolah, guru kelas, dan guru pembimbing khusus menjadi subyek atau informan penelitian. (1) Kedudukan kepala sekolah sebagai pemegang keputusan tertinggi dalam suatu lembaga sangat berpengaruh terhadap arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh Lembaga tersebut dalam rangka memaksimalkan pengelolaan Pendidikan inklusif. (2) Sejak awal penyelenggaraan hingga saat ini, banyak kendala dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di SDN Mentikan 1 Kota Mojokerto. Padahal masalah keuangan adalah komponen yang paling mendasar dan penting.

ABSTRACT

This article explains how educational inclusion is implemented in primary school through school management. This study uses a qualitative descriptive research methodology. Data was collected in the form of observation, interviews and documentation. Principals, class teachers, and special supervising teachers become research subjects or informants. (1) The position of the school principal as the highest decision holder in an institution greatly influences the direction and goals to be achieved by the institution in order to maximize the management of inclusive education. (2) Since the beginning of implementation until now, there have been many obstacles in the implementation of inclusive education at SDN Mentikan 1, Mojokerto City. In fact financial problems are the most basic and important component.



©2023 Authors. Published by Sabajaya Publisher. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Setiap usaha, dukungan serta perlindungan yang diberikan kepada anak merupakan bentuk pendidikan. Adapun bantuan untuk anak mengacu pada upaya seseorang untuk mengajarkan atau meningkatkan kecerdasan, tata krama, perihal materi, perilaku sosial, keterampilan interpersonal, dan pengolahan emosi pada anak sehingga anak dapat bertindak sesuai aturan di lingkungannya. (Sholawati, 2019). Pada umumnya, pendidikan bukan hanya persoalan teoretis; Upaya pendidik dalam mengajar peserta didik juga harus memperhatikan moral anak-anak dan sejalan dengan manajemen atau strategi yang dipikirkan matang-matang sebagai landasan bagi pengajar untuk mengembangkan karakter setiap anak. Pendidikan dapat dilakukan dalam lingkungan sosial, meskipun tidak selalu berskala besar.

Untuk memenuhi kebutuhan setiap anak, telah dilaksanakan program pendidikan inklusif yang berorientasi pada pelayanan kepada anak. Program pendidikan inklusi dikembangkan untuk semua siswa, tidak hanya mereka yang berkebutuhan khusus, karena setiap anak pada dasarnya memiliki sifat, individualitas dan keragaman. Kekhasan setiap siswa harus didukung pada semua

jenjang Pendidikan, terutama pada Pendidikan anak usia dini. Dalam pembelajaran, budaya, dan masyarakat, inklusi dapat dilihat sebagai proses yang meningkatkan keterlibatan sambil mengurangi eksklusi dari dan dari kegiatan pendidikan (Wathoni, 2013). Dengan pandangan bersama bahwa inklusif merupakan tanggung jawab untuk mengajar semua anak yang memiliki usia dengan rentang yang sama, inklusi berarti memperbarui dan mengadaptasi materials, techniques, structures and strategies dalam sistem reguler (UNESCO, 1994). Sistem seperti inklusi hanya dapat diterapkan setelah semua siswa menyadarinya dan mendukungnya.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan pengetahuan sebanyak mungkin dari para ahli dalam subjek untuk menjawab pertanyaan penelitian. Alhasil, merekam persoalan atau masalah yang muncul di lapangan dianggap istimewa, signifikan, dan mempesona. Jika masalah dapat diidentifikasi, maka dimungkinkan untuk mengajukannya sebagai topik penelitian di kemudian hari.

Jika penelitian dianggap layak untuk dilanjutkan sampai menemukan solusi sebagaimana dinyatakan dalam tujuan dan manfaat penelitian, hal itu ditentukan oleh masalah-masalah yang diperoleh dari dunia empiris. Untuk mengidentifikasi masalah pada langkah pertama, peneliti harus melakukan beberapa pengamatan awal. Alasan penangkapan harus memaksa dan memaksa, mendesak dan mendesak, dan khas sementara di tempat lain kesulitan seperti itu sulit ditemukan.

Pada observasi awal, peneliti menemukan aspek-aspek manajemen di lembaga pendidikan sesuai dengan program studi yang diampu. Keberhasilan mutu dan prestasi suatu sekolah ditentukan oleh pengelolaannya. Penelitian tentang manajemen atau manajemen sekolah sangat diperlukan untuk memenuhi persyaratan mutu sekolah. Hal inilah yang mendasari penelitian ini dari segi urgensinya.

Peneliti juga melanjutkan untuk membahas kepentingan penelitian setelah menguraikan alasan mengapa perlu dilakukan penelitian tentang manajemen sekolah. Ini panggilan untuk studi tentang isu-isu utama oleh para peneliti untuk administrasi sekolah. Para peneliti berkonsentrasi pada bagaimana pendidikan inklusif diimplementasikan, yang sebenarnya merupakan poin krusial. Topik ini memiliki tema dan pembahasan yang spesifik, yaitu mengungkap keberadaan dan penerapan esensinya dengan segala tantangan di sekolah, cara mengatasinya harus efektif dan efisien dengan melalui manajemen. Hal inilah yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini menarik untuk diterapkan serta dikembangkan guna menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Penyebab khusus untuk penelitian ini dilakukan setelah tahap menunjukkan urgensi dan minat penelitian ini. Masuk akal jika penelitian ini dilakukan di lembaga yang mengadopsi pendidikan inklusif, dan SDN Mentikan 1 Kota Mojokerto dipilih untuk penelitian ini. Karena sangat sedikit sekolah yang mempraktekkan pendidikan inklusif semacam ini, maka dipilihlah sekolah yang satu ini karena mangacu kepada konteks masalah yang ada.

Kita semua mengetahui bahwa pendidikan merupakan sarana yang paling hakiki yang dimiliki manusia untuk keuntungan diri sendiri dan orang lain, apalagi manusia adalah makhluk sosial. Kita dapat berkomunikasi dengan lingkungan kita secara lebih efektif ketika kita memiliki informasi, dan ide, ide, dan kesadaran akan mengikuti. Oleh karena itu, terlepas dari latar belakang warga negara, terutama mereka yang berkebutuhan khusus, negara harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang baik.

Dalam hal pendidikan, pemerintah harus memberikan prioritas yang sama kepada siswa yang orang tuanya berasal dari kalangan menengah ke bawah, dianggap cacat, atau memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dengan anak lainnya. Artinya harus lebih mengutamakan anak yang mempunyai keahlian sama dengan anak lainnya dan lebih mengutamakan siswa dari golongan darah biru. Bunyi Pasal 31 Ayat 1 UUD, “memperoleh Pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara”.

Namun, pada kenyataannya, masih banyak anak-anak yang bahkan tidak berusaha untuk belajar apapun, terutama anak yang memiliki kebutuhan khusus. Bagaimana bisa? Anak berkebutuhan khusus adalah warga negara, dan sebagaimana amanat Pasal 31 ayat 1 UUD 1945, mereka wajib mengenyam pembelajaran. Pendekatan apa yang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah ini.

Pada kenyataannya, ini bukanlah isu terkini; itu telah ada selama beberapa waktu, dan pemerintah telah mencoba beberapa pendekatan berbeda. Sekolah luar biasa, atau SLB seperti yang sering disebut. Masalah SLB hanya ada di ibu kota kabupaten, yang berlaku hampir di setiap ibu kota kabupaten. Saya menggunakan lingkungan saya, Kec. Turatea, Kab. Jenepono, sebagai contoh. Banyak anak dengan kebutuhan luar biasa tinggal di komunitas yang jauh tanpa akses ke pendidikan apa pun. Walaupun sebagian besar orang tua tidak mampu membiayai pendidikan anaknya dan sudah



tidak berminat terhadap pendidikan karena menganggap kondisi anaknya tidak memungkinkan untuk mengenyam pendidikan yang bersangkutan, bukan berarti mereka tidak mau menyekolahkan anaknya ke sekolah khusus.

Kemudian pemerintah kembali menghadirkan pendidikan inklusif sebagai solusi atas persoalan tersebut. (Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003) yang menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif di Indonesia dalam pengertiannya menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau yang memiliki kecerdasan berbeda dengan anak pada umumnya dilakukan secara inklusif atau Tentu bisa sekolah luar biasa dengan SOP tersendiri. Oleh karena itu, pendidikan inklusif dapat sedapat mungkin dipadukan dengan pendidikan formal atau reguler. Landasan hukum ini membuat sekolah umum tidak perlu melarang siswa dengan kebutuhan luar biasa untuk bersekolah di sekolah reguler.

Mereka berhak atas pendidikan khusus, yang merupakan salah satu bentuk pendidikan. “Siswa yang kesulitan belajar karena kelainan emosi, mental, fisik, atau sosial yang berpotensi menjadi cerdas dan memiliki bakat yang unik diberikan Pendidikan khusus” bunyi UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 32, Paragraf 1, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Penyelenggara pendidikan khusus disusun secara inklusif pada satuan pendidikan formal dan kejuruan. Fakta ini menunjukkan bahwa Pendidikan Luar Biasa yang kemudian berganti nama menjadi Pendidikan Luar Biasa telah mengalami transisi mendasar di Indonesia. Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional digunakan istilah “pendidikan khusus”. Perubahan mendasar dalam bidang pendidikan adalah melalui pendidikan inklusi. Perubahan tersebut meliputi pergeseran landasan berpikir dari pendidikan ke pendidikan kebutuhan khusus, serta perubahan kesadaran dan kesiapan perencanaan praktisi pendidikan, kondisi, metodologi, dan penggunaan konsep terkait seperti konsep anak berkebutuhan khusus (ABK). Atau siswa berkebutuhan khusus (PDBK), antara lain.

Dibandingkan dengan pendidikan anak berkebutuhan khusus, konsep anak berkebutuhan khusus memiliki arti dan makna yang lebih luas (Zulaikhah et al., 2020). Anak berkebutuhan khusus memerlukan layanan pendidikan yang lebih khusus yang berbeda dengan yang diberikan kepada anak pada umumnya. Keuntungan memiliki anak berkebutuhan khusus sering dikutip, bersama dengan tantangan perkembangan dan pembelajaran tertentu yang unik. Oleh karena itu mereka harus mendapatkan layanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan atau tantangan unik setiap siswa (Abdurrohman & Syamsiar, 2017; Wathoni, 2013).

Sekolah umum harus dapat mengontrol semua anak, terutama mereka yang berkebutuhan khusus, mengingat keragaman siswa yang mereka daftarkan. Dalam rangka mengelola atau menerima anak berkebutuhan khusus, suatu lembaga harus memiliki komitmen yang kuat dari warganya terhadap inklusi proaktif, pengelolaan inklusi yang profesional dalam pendidikan, dan pengembangan pendidikan inklusi dengan tujuan mencapai tujuan pendidikan itu sendiri (Sumarni Sumarni, 2019).

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, setiap alat pendidikan harus dioptimalkan, dan administrasi yang tepat sangat penting. Dalam hal ini, manajemen berfungsi sebagai sarana praktis untuk mencapai visi dan misi lembaga (Bahri & Arafah, 2020; Fadhillah, 2016 planning, organizing, acting, controlling, and evaluating adalah langkah pertama. Untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, anggota struktural lembaga juga harus berperan aktif dan memanfaatkan/memberdayakan sumber daya organisasi (Tajudin & Aprilianto, 2020). Karena ide sumber daya sekolah dapat diolah langsung sesuai dengan tuntutan siswa dengan administrasi sekolah yang baik maka sekolah akan mampu mengembangkan program yang lebih baik (Matwaya & Zahro, 2020; Ridwan, 2018).

Profesionalisme menjadi salah satu acuan penting untuk mewujudkan nuansa pembelajaran yang diinginkan peserta didik dalam peningkatan kualitas pembelajaran (Hasanah, 2020; Ma'arif & Kartiko, 2018). Akibatnya, itu akan menghasilkan jumlah murid yang cukup dari kaliber yang dibutuhkan untuk meningkatkan standar pendidikan. Sebenarnya optimisme ini tidak berlebihan. Karena posisi sentral seorang guru sebenarnya menjadi satu-satunya fokus paradigma pendidikan nasional selama sepuluh tahun terakhir. Dalam hal ini, siswa hanyalah penonton yang dengan penuh perhatian mendengarkan dan mengamati apa yang dijelaskan oleh guru.

Salah satu dari beberapa SD di Kota Mojokerto yang menggalakkan program inklusi atau pendidikan bagi anak difabel adalah SDN Mentikan 1. Sekolah tersebut telah melaksanakan

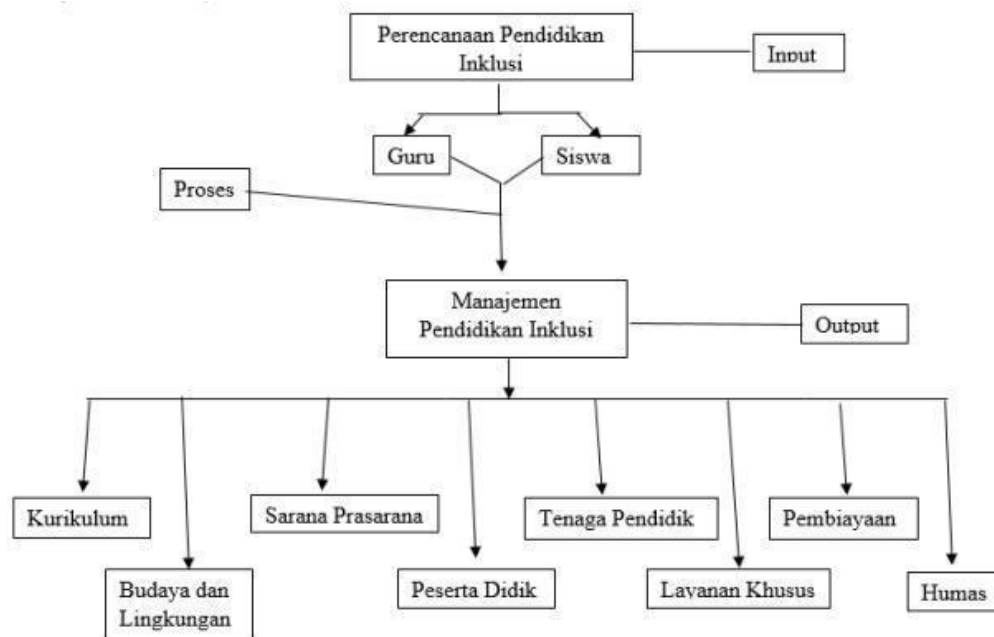


pendidikan inklusif selama kurang lebih tujuh tahun. Pelaksanaan pendidikan inklusif tidaklah sederhana; itu membutuhkan kreativitas dan inovasi yang dapat bekerja secara harmonis antara anak-anak yang biasanya berkembang dan mereka yang berkebutuhan khusus sehingga mereka dapat berinteraksi satu sama lain tanpa menghadapi prasangka dari siswa lain.

Karena sudah banyak siswa di SDN Mentikan 1 Kota Mojokerto, khususnya ABK yang telah menjuarai berbagai lomba di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, maka program pendidikan inklusi dinilai sangat bermutu. Karena efektivitas dan efisiensi relatif manajemen, itu harus digunakan sebagai refleksi. Peneliti juga harus menyelidiki dan mempelajari lebih jauh tentang pelaksanaan dan pengelolaan program pendidikan inklusi di SDN Mentikan 1 Kota Mojokerto, khususnya dalam hal pengembangan kurikulum, pengelolaan infrastruktur, dan bagaimana membina hubungan positif dengan masyarakat sekitar atau orang tua siswa. Karena sudah diperhitungkan, maka sangat penting bagi generasi penerus yang peduli terhadap pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus pada umumnya dan peneliti pada khususnya untuk memanfaatkannya sebagai bahan dan modal pembelajaran.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Sujarweni (2014) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang menghasilkan hasil yang tidak dapat diperoleh melalui teknik statistik atau teknik kuantifikasi (pengukuran) lainnya. Data kualitatif dikumpulkan dengan menggunakan pembicaraan terfokus, analisis dokumen, wawancara, atau observasi lapangan yang telah didokumentasikan dalam catatan lapangan (Dady, Ilat, & Pontoh, 2017). Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah membuat gambaran atau gambaran yang deskriptif, metodis, faktual, dan akurat tentang fakta atau fenomena yang diteliti (Convelo et al., 2013). Penelitian deskriptif kualitatif pada hakekatnya merupakan sarana untuk menganalisis status sekelompok individu, suatu objek.



Gambar 1. Manajemen Pendidikan Inklusi

Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Meskipun model Hubberman digunakan dalam proses analisis data (Miles et al., 2014), khususnya: Reduksi data adalah proses mereduksi data setelah wawancara informan untuk menyaring informasi asing secara tepat. Penyajian data dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil aktual. Metode validasi informasi merupakan salah satu cara untuk menjamin kualitas data penelitian (Creswell, 2007). Pendekatan ini diuji dengan menelaah data yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Triangulasi adalah cara memverifikasi integritas dengan



membandingkan informasi dari berbagai teknik, sumber, dan panjang informasi yang diperoleh. Ini digunakan untuk menentukan validitas atau integritas informasi. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi metode, yaitu memverifikasi konsistensi data dengan cara membandingkan data dari sumber-sumber terkait dengan berbagai pendekatan. Data yang diambil dari beberapa observasi sebagai berikut:

Tabel 1. Topik data permasalahan melalui observasi

No.	Topik
1.	Perencanaan : Rencana kebutuhan sarana prasarana Rapat perencanaan sarana prasarana
2.	Pengorganisasian : Deskripsi kerja pengelolaan sarana prasarana Struktur organisasi pengelolaan sarana prasarana
3.	Pelaksanaan : Suasana kegiatan pembelajaran siswa Sarana prasarana sekolah Ruang kelas serta sarana prasarana
4.	Pengontrolan : Penghapusan sarana prasarana Investarisasi sarana prasarana

Reduksi, tampilan, dan verifikasi data digunakan untuk menilai data setelah dikumpulkan (Miles dan Huberman, 1992). Dalam penelitian ini, metode analisis data deskriptif (nonstatistik), atau deskripsi data dalam kata atau frasa yang dibagi berdasarkan kategori, digunakan untuk menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan terencana khusus atau instruksi yang dirancang khusus (SDI) harus diberikan kepada semua siswa yang memenuhi persyaratan untuk pendidikan khusus. Tujuan SDI adalah untuk memenuhi kebutuhan unik siswa penyandang disabilitas. SDI terus dipantau, dan setiap kemajuan terkait pengajaran harus dilaporkan. Pembelajaran khusus ini melibatkan lebih dari sekedar persepsi kesulitan komunikasi; itu juga membahas perilaku, keterampilan sosial, kemampuan fungsional atau kejuruan, dan domain yang kemungkinan akan terpengaruh oleh keadaan yang meresahkan (Tarnoto, 2016).

Pendidikan yang bertujuan untuk mengakomodir segala perbedaan siswa, termasuk yang berkebutuhan khusus, dikenal dengan pendidikan inklusi. Ditinjau dari konteks dan paradigma, pendidikan inklusif bersifat akomodatif karena menerima setiap peserta didik tanpa memberi label, mengakar dalam operasionalnya, dan aktif melibatkan pihak-pihak terkait (Agustin, 2017).

Tindakan manajemen, atau serangkaian kegiatan, adalah sesuatu yang dilakukan dari, oleh, dan untuk manusia. Rangkaian kegiatan merupakan proses pengelolaan kegiatan pendidikan yang rumit dan khas yang menyimpang dari tujuan usaha untuk menghasilkan keuntungan yang cukup besar (Sulistyaningsih, 2021). Secara teori, manajemen pendidikan adalah cara untuk menerapkan manajemen atau administrasi pada dunia pengelolaan, koordinasi, dan pendistribusian sumber daya. Hal ini sesuai dengan pernyataan kantor pusat Nurhadi bahwa “Sumber tentang cara terbaik mengatur Sumber Daya Manusia (SDM), kurikulum, atau sumber belajar dan fasilitas untuk mencapai tujuan Pendidikan dan menciptakan lingkungan yang positif bagi orang-orang sementara merea secara bersamaan berpartisipasi dalam tuntutan Pendidikan yang ditetapkan dan diterima dikenal sebagai manajemen pendidikan” (Marlia, 2018).

Proses yang digunakan untuk mewujudkan sistem pendidikan inklusif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Di sekolah inklusif, kepala sekolah memiliki kendali penuh atas manajemen proses pendidikan, yang meliputi mengatur, mengarahkan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi semua aspek



proses pendidikan, termasuk hubungan, kurikulum, tenaga pengajar, sarana dan prasarana, pendanaan pendidikan, proses pendidikan, dan siswa. mengintegrasikan sekolah dan masyarakat (Shofa, 2018).

Kegiatan pengelolaan infrastruktur telah diatur di bawah arahan seorang kepala sekolah atau koordinator. Koordinator sarpras mengelola kebutuhan sarana dan prasarana di sekolah ini, serta melaporkan hasilnya kepada kepala sekolah. Koordinator ini tentunya akan dimintai pertanggungjawaban atas kewajibannya kepada kepala sekolah yang merupakan pimpinan tertinggi di sekolah. Tugas kepala sekolah sangat penting karena mereka mengawasi kelancaran operasi kegiatan yang berkaitan dengan strategi infrastruktur sekolah. Dalam konteks ini, pengadaan sarana prasarana yang telah ditetapkan sebelumnya melalui rapat pleno yang meliputi banyak bagian disebut sebagai tahap pelaksanaan (Torlakson, 2011). Koordinator infrastruktur menerima laporan dari kepala sekolah dan bendahara meminta mereka untuk melakukan pembelian darurat atau melakukan tender barang.

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak terkait kemudian akan dipresentasikan. Hasil tersebut dijabarkan berdasarkan fokus penelitian yaitu: (1) pengelolaan pendidikan inklusif; (2) hambatan pengelolaan penyelenggara pendidikan inklusif; dan (3) upaya mengatasi permasalahan penyelenggaraan pendidikan inklusi.

Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Salah satu dari empat sekolah di Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur yang menganut pendidikan inklusi adalah SDN Mentikan 1. Meski menerima anak berkebutuhan khusus sebelum ditetapkan sebagai sekolah inklusi pada 2013, Pemerintah Kota Mojokerto, dalam hal ini Diknas Kota Mojokerto, sudah menggambarkan sekolah tersebut sejak saat itu. Keputusan sekolah untuk memperkenalkan pendidikan inklusif bukan tanpa alasan; kepala sekolah pada saat itu dan banyak guru memiliki keprihatinan tentang pengajaran siswa berkebutuhan khusus.

Untuk menerapkannya secara efektif, pendidik dan pekerja pendukung harus berkolaborasi untuk menyediakan pendidikan yang paling inklusif. Dinas Pendidikan, pengelola sekolah, dan masyarakat setempat adalah yang pertama menyebutkan bahwa hal itu membutuhkan perencanaan yang matang, organisasi yang baik, pengarahan yang kompeten, dan pengawasan yang kuat dari pihak terkait. Fungsi kepala sekolah sebagai pengambil keputusan dalam hal memaksimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusi

Level tertinggi dari suatu organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap visi dan misi organisasi. Penyelenggaraan pendidikan inklusi akan diuntungkan dengan adanya komunikasi yang efektif antara pengelola lembaga (kepala sekolah), guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat. Selain itu, infrastruktur yang kompeten dan sumber daya manusia yang berkualitas meningkatkan pencapaian manajemen pendidikan inklusif.

Tidak diragukan lagi, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur sebagai pendukung, dan dukungan dari masyarakat/orang tua anak semua berkontribusi pada keberhasilan program pengelolaan sekolah.

Setiap anak memiliki tingkat kecerdasan dan bakat yang berbeda, sehingga sekolah sebaiknya mengambil inisiatif khusus seperti mendorong Kerjasama antara Lembaga Pendidikan dan organisasi pemerintah, khususnya dinas Pendidikan setempat. Pasal 1 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa “Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian dan eberhasilan sosial, Pendidikan adalah usaha yang disengaja dan terorganisir untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran” (penekanan ditambahkan). Untuk mewujudkan Pendidikan inklusi, pemerintah kabupaten dan sekolah di kota harus secara sadar meningkatkan komunikasi.

Penghambat Pengelolaan Pendidikan Inklusi

Munculnya hambatan dan hambatan selalu mengikuti penyebaran manajemen. Masalah manajemen sekolah tidak dapat dihindari untuk muncul ketika mengelola pendidikan inklusif. Sebagai penanggung jawab sekolah, kepala sekolah adalah seorang manajer dengan kekuasaan, tugas, dan kewajiban yang diperlukan untuk keberhasilan program manajemen.

Berdasarkan informasi dan observasi diketahui bahwa ketersediaan guru pendamping dirasa masih kurang dan hal tersebut menjadi kendala utama pelaksanaannya di SDN Mentikan 1 Mojokerto. Khusus untuk pendamping guru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia



menyatakan dalam pedoman pelaksanaan kurikulum PDBK di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi yang menyediakan kelas khusus dengan menggunakan rasio Guru Bimbingan Khusus: Siswa Berkebutuhan Khusus. = 1:5 bahwa jumlah guru pembimbing khusus adalah wajib.

Peneliti berhipotesis bahwa keberadaan guru pendamping khusus merupakan kebutuhan dasar dan harus dipenuhi bagi guru Pendamping Khusus (GPK) yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang tidak memadai berdasarkan observasi yang dilakukan pada tahap perencanaan. Tantangan utama yang dihadapi oleh penyelenggara pendidikan inklusif di lingkungan sekolah dasar manapun adalah kurangnya instruktur pendamping kelas.

Kepala sekolah bertanggung jawab untuk ini karena ini adalah masalah manajerial. Meskipun keuangan atau anggaran adalah alasan utama untuk hampir semua sekolah negeri, amanat konstitusi menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan, sehingga harus ada upaya internal untuk menghilangkan semua hambatan.

Tahap Pengarahan Pendidikan Inklusi

Tahap inventarisasi dilakukan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh dinas pendidikan terkait, hanya mensyaratkan pihak sekolah untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Aplikasi dapodik terbaru yang dibuat oleh penyelenggara pendidikan dan kebudayaan kini diterima untuk keperluan inventarisasi. Karena keterbatasan bahan yang tersedia untuk analisis kebutuhan selama implementasi, desain fasilitas infrastruktur belum dilakukan secara maksimal. Di sisi pengorganisasian, beberapa anggota staf yang diberi tanggung jawab untuk menyelesaikannya belum melakukannya dengan baik.

Observasi lapangan pada pelaksanaan pendidikan inklusi SDN Mentikan 1 di Mojokerto pada awalnya sedikit mengalami kesulitan dalam mengambil materi. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya mengawasi penerapan pendidikan inklusif. Tantangan tersebut muncul karena rangsangan yang dialami siswa berkebutuhan khusus sangat bervariasi dan memerlukan penanganan yang cermat. Dalam pendidikan inklusif, mengelola satu anak berkebutuhan khusus sama menantanginya dengan mengelola satu kelas siswa reguler atau rata-rata.

Membatasinya dapat dilakukan dari perspektif komunikasi, transfer pengetahuan, atau ketahanan sambil tetap mengingat proses pembelajaran. Para siswa ini dikenal sebagai anak-anak berkebutuhan khusus karena masalah daya tahan memang menjadi kesulitan yang unik. Faktor terpenting dalam pelaksanaan pendidikan inklusi adalah kompetensi yang ditentukan oleh kepribadian guru pendamping dan seringkali bersumber dari kesabaran. Ketika guru yang mengikuti siswa dalam proses belajar mengajar menjadi lelah dan kehilangan fokus, penting untuk menunjukkan kesabaran (Arikarani, 2019). Penghalang terbesar bagi perkembangan anak adalah keyakinan orang tua bahwa instruktur di kelas memikul tanggung jawab eksklusif untuk itu. Harapan yang diberikan kepada guru pendamping oleh orang tua tersebut dapat membuatnya kurang bersemangat dan fokus. Praktik penyerahan tanpa pandang bulu ini seringkali menghambat. Penghalang diciptakan oleh kurangnya pengetahuan orang tua tentang anak-anak berkebutuhan khusus serta harapan ayah putra mereka yang terlalu tinggi. Selain itu, status orang tua tunggal selalu menimbulkan tantangan yang mempersulit instruktur untuk mendukung siswa dalam pendidikan inklusif di kelas, menurut pengamatan yang dilakukan di lapangan. Model siswa berkebutuhan khusus nampaknya memerlukan penanganan satu per satu dari pihak siswanya, yang berbeda dan berbeda. Misalnya, jika ada dua siswa berkebutuhan khusus di kelas, pada dasarnya harus ada tiga guru yang hadir: satu guru kelas biasa dan dua guru pendamping siswa. Jika tidak ada cukup anak berkebutuhan khusus di setiap kelas, masalah mungkin menjadi terlalu banyak.

Semakin meningkat, semakin banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh guru pendamping. Menurut pengamatan yang dilakukan di lapangan, setiap kelas anak berkebutuhan khusus rata-rata mengalami keterlambatan akademik. Karakteristik yang tampaknya tidak penting ini sebenarnya berimplikasi besar pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di kelas.

Tahap Pengawasan Pendidikan Inklusi

Masuk akal jika tantangan muncul selama tahap pemantauan sebagai akibat dari tantangan yang dihadapi selama tahap perencanaan dan pengarahan. Aspek yang paling rumit dalam mengelola pendidikan inklusif adalah koordinasi birokrasi dengan sekolah dan lembaga lain. Untuk mencapai



tujuan pendidikan inklusi, menurut UU No. 20 Tahun 2003, "Pendidian merupakan usaha sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses belajar agar peserta didik aktif mengembangkan potensinya." Memiliki karakteristik moral, pengendalian diri, dan kekuatan beragama.

Dengan tujuan untuk menunjukkan kepada kepala sekolah dan guru pendamping seberapa baik persiapan itu dilaksanakan. Merencanakan, mengarahkan, dan menerapkan hambatan menghasilkan pengawasan di bawah standar. Perwujudan hasil yang ideal terhambat oleh kelemahan komponen-komponen perencanaan tersebut di atas serta pembatasan arahnya (Juran, 1992). Akibatnya, ada pembatasan pelaporan dalam administrasi guru pendamping karena disibukkan dengan sesi pembelajaran di kelas, sehingga terjadi keterlambatan atau bahkan ketiadaan aspek evaluasi, dimana evaluasi dilakukan asal-asalan yaitu selama mereka dibuat dan selama mereka dapat dilaporkan.

Pada akhirnya berkaitan dengan anggaran atau bagian keuangan dari proses penerapan pendidikan inklusi di sekolah ini yang kurang memadai. Terlepas dari kenyataan bahwa pelatihan manajemen kelas inklusif telah diberikan, tantangan tetap ada baik dalam implementasi maupun pengawasannya.

Upaya untuk mengelola isu Pendidikan inklusif

Selain keterbatasan dan tantangan secara inheren selalu ada dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, penyelenggaraan sekolah di SDN Mentikan 1 Mojokerto diawasi oleh kepala sekolah yang harus mengamati dan mengidentifikasi masalah serta mengembangkan solusi yang dapat diterima dengan pasti.

Pengelola sekolah diharuskan mengimplementasikan beberapa komponen solusi ini, tentunya dengan optimalisasi dan modifikasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain: *letter of legality*, *school organizational structure*, *socialization*, *planning*, *coordination*, and *control*. Di daerah ini, baru terealisasi kerangka legislasi dan ketentuan sekolah yang ada, dan manajemen sekolah masih belum maksimal.

Koordinasi dan kontrol tidak ideal untuk perencanaan. Optimalisasi manajemen kepala sekolah harus diperkuat sebagai satu-satunya jawaban. Tanpa dukungan manajerial dari kepala sekolah, segala upaya untuk mengadopsi pendidikan inklusi hanya sebatas nama di papan nama. Seiring dengan pengoptimalan terencana, ini penting untuk langkah solusi selanjutnya.

Apa yang terjadi dalam kursus adalah komponen dari kurikulum. Ini menegur pengelola dan membantu guru untuk mempertimbangkan peran mereka sebagai komandan dalam proses pembelajaran dengan hati-hati untuk memastikan implementasi kurikulum yang berhasil. Dimanapun penyelenggara pendidikan mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus, segala orisinalitas dan kreativitas guru pendamping akan bertebaran dan kemudian kembali lagi; Kesabaran adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dalam situasi ini. Anak berkebutuhan khusus mampu menjaga ketenangan dan kesunyian di Kelas (Abidin, 2014; Maarif & Rofiq, 2018).

Ini terdiri dari empat langkah mendasar terkait guru dan tenaga kependidikan lainnya, yaitu: kredensial dan muatan; komitmen; adanya guru pembimbing khusus; dan kehadiran terapis atau ahli lainnya. Pimpinan madrasah harus mengambil keputusan yang baik terkait masalah ini karena memiliki keterbatasan juga. Pembatasan anggaran sekali lagi menjadi kenyataan atau faktor dalam menentukan strategi kemenangan. Meskipun selama ini kinerja pengelola sekolah belum baik, namun masih ada jalan keluarnya, yaitu terus meningkatkan keterampilan guru pendamping yang direkrut dari tenaga pengajar honorer dan diberikan pelatihan yang diperlukan untuk mendukung kursus inklusi.

Mengenai infrastruktur dan fasilitas di sekolah, ada empat aturan mendasar yang harus diikuti: adanya kelas khusus; sumber daya pendidikan; aksesibilitas fisik; dan perpustakaan. Termasuk dalam judul "Pembiayaan" adalah tiga indikator: alokasi pembiayaan, dukungan pembiayaan, dan pelaporan penggunaan uang. karena keduanya saling berhubungan, menggabungkan infrastruktur dan fasilitas keuangan menjadi satu kesatuan. Satu-satunya pilihan kepala sekolah adalah mengajukan anggaran tambahan untuk mengelola kelas inklusif ini seefektif mungkin. Itupun, penerima bantuan anggaran harus menunggu satu tahun tambahan untuk pencairan anggaran berikutnya (Muslimin & Kartiko, 2020).



Mengaktifkan kepala sekolah dan instruktur pendamping kelas dengan melibatkan perhatian orang tua murid adalah cara yang benar untuk mengadopsi pendidikan inklusif dalam pengelolaan sekolah. Dengan sinergi tersebut, pengelolaan dapat optimal dan efisien, efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Sebagai pemegang keputusan paling tinggi adalah peran kepala sekolah dalam suatu organisasi serta sangat berpengaruh terhadap tujuan yang ingin dicapai bagi organisasi tersebut dalam mengelola pendidikan inklusi seefektif mungkin. Tata kelola pendidikan inklusif akan mendapat manfaat dari komunikasi yang efektif antara pengelola, guru kelas, guru pembimbing khusus, dan masyarakat. Selain itu, efektivitas sumber daya manusia dan aksesibilitas sarana dan prasarana sangat penting untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif yang efisien.

Kendala dan hambatan selalu mengikuti pelaksanaan program manajemen. Di SDN Mentikan 1 Kota Mojokerto belum ada pengaturan pengelolaan inklusi. Penyelenggaraan pendidikan inklusi di SDN 1 Mentikan Kota Mojokerto sejak awal telah dikenai berbagai sanksi. Namun, persoalan perjanjian merupakan komponen yang paling mendasar dan berpengaruh. Untuk mengatasi isu yang belum bisa dituntaskan SDN Mentikan 1 saja, sekolah membagi dan memprioritaskan masalah sebelum melaporkannya ke dinas terkait dan dinas Pendidikan provinsi Jawa Timur telah memilih pusat sumber daya SLB Pertiwi sebagai lokasinya. Mengenai administrasi Pendidikan khusus untuk anak-anak, sebuah sekolah menerima keluhan.

REFERENSI

Jurnal :

- Agustiandra, V., & Sabandi, A. (2019). Persepsi Guru Terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Padang. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 8(1), 1- 8.
- Bafadal, I. (2018). Manajemen implementasi kurikulum dan pembelajaran berbasis tauhid dalam pembentukan karakter peserta didik. *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 1(2), 188–197.
- Baltzan, P. (2018). *Information Systems*. New York: McGraw-Hill.
- Brown, C. V., DeHayes, D. W., Hoffer, J. A., Martin, E. W., & Perkins, W. C. (2012). *Managing Information Technology*. New Jersey: Pearson.
- Budiwibowo, S., & Sudarmiani. (2019). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Andi.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publication.
- Harris, J., & Wihak, C. 2018. *The Recognition of Non-Formal Education in Higher Education: Where Are We Now, and Are We Learning from Experience?*. *International Journal E-Learning & Distance Education*, 33 (1), 1-19.
- Komariah, N. (2018). Implementasi fungsi manajemen pendidikan di sdi wirausaha indonesia. *Jurnal Perspektif*, 16(1), 107–112.
- Koran Pendidikan, Arah Kebijakan Pendidikan Indonesia, dipublikasikan pada 15 Desember 2019.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2019). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. London: Pearson.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publication.
- Nur, D., Sari, A., Bafadal, I., Wiyono, B. B., & Malang, U. N. (2018). Implementasi manajemen berbasis sekolah. *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 1(2), 213– 221.
- Putri, A. F. S., & Harmanto, H. (2020). Manajemen Pendidikan Inklusi dalam Penanaman Karakter Tanggung Jawab pada Mata Pelajaran PPKn di SMP Pendahuluan Pendidikan karakter sangat penting dibutuhkan oleh peserta didik dalam era globalisasi saat ini. 1 Karakter yang perlu ditekankan pada pesert. 6(1), 106–118.
- Rukayat, Y. (2018). Kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di kecamatan pasirjambu. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, 11(2).



- Sastradiharja, E. J., MS, F., & Sutarya, M. (2020). Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi: Studi Pada Pusat Kajian dan Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Politeknik Negeri Jakarta. *Alim Journal of Islamic*, I(2), 1–118.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Dictionary/Encyclopedia – online :

- Arikarani, Y. (2019). *Analisis Eduitainment Dan Brain Based Learning* Perspektif Psikologi Pembelajaran Pai Dan Agama. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 14(1), 125–156. <https://doi.org/10.21043/edukasia.v14i1.4915>
- Bahri, S., & Arafah, N. (2020). Analisis Manajemen SDM Dalam Mengembangkan Strategi Pembelajaran Di Era *New Normal*. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 1(1), 20–40. <https://doi.org/10.31538/tijie.v1i1.2>.
- Hasanah, M. (2020). Rekrutmen Dan Seleksi Tenaga Pendidikan (Guru) Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SMA Unggulan Berbasis Pesantren Amanatul Ummah Pacet. *AlTarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.24235/tarbawi.v5i1.6310>.
- Ikramullah, I., & Sirojuddin, A. (2020). Optimalisasi Manajemen Sekolah Dalam Menerapkan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 131–139. <https://pasca.jurnalikhac.ac.id/index.php/munaddhomah/article/view/36>.
- Matwaya, A. M., & Zahro, A. (2020). Konsep Spiritual *Quotient* Menurut Danah Zohar dan Ian Marshall Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 3(2), 41–48. <http://www.jurnal.staidagresik.ac.id/index.php/attadrib/article/view/112>.
- Muslimin, T. A., & Kartiko, A. (2020). Pengaruh Sarana dan Prasarana Terhadap Mutu Pendidikan di Madrasah Bertaraf Internasional Nurul Ummah Pacet Mojokerto. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 75–87. <https://pasca.jurnalikhac.ac.id/index.php/munaddhomah/article/view/30>.
- Nursyifa, A. (2019). Pembinaan Kepala Sekolah Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Loyalitas Sosial*, 1(1). Diambil dari <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JLS>.
- Rusmono, D. O. (2020). Optimalisasi Pendidikan Inklusi di Sekolah: *Literature Review*. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(2), 209–217. <https://ejournal.uksw.edu/kelola/article/view/2859/1621>.
- Sholawati, S. A. (2019). Manajemen Pembelajaran Pendidikan Inklusi Pada Anak Berkebutuhan Khusus Di SDN Kalirungkut-1 Surabaya. *Abdau: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 2(1), 39–60. <https://doi.org/10.36768/abdau.v2i1.24>.
- Siswanto, S., & Susanti, E. (2019). Manajemen Pengembangan Kurikulum Sekolah Inklusi. *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 3(2), 113. <https://doi.org/10.29240/jsmp.v3i2.927>.
- Sugiarto, A., & Mastikasari, K. (2018). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah, Lingkungan Kerja, dan Budaya Sekolah Terhadap Kinerja Guru di SMA Kota Wates Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *In Prosiding Seminar Nasional FKIP*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. Diambil dari <http://usd.ac.id/snfkip2018> (diakses 21 Desember 2019)
- Sulistyaningsih, M. (2021). Manajemen Pendidikan Inklusi di SMP Islam Al-Irsyad Cilacap. Tarnoto, N. (2016). Permasalahan-Permasalahan Yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi 100 Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar – Syaiful Bahri DOI: <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1754>.



